

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

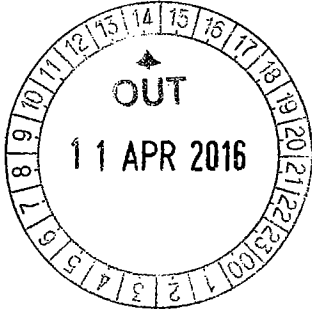

Tuti Riyati

LEMBAR DISPOSISI
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Tanggal Terima Surat :	Nomor Agenda	B/R	A/T
12 April 2016	11101/D.VIII/4/2016		
Diterima dari : MENTERI PERHUBUNGAN			
Nomor Surat : KU.101/1/1 A PHB 2016 (agenda menteri 1706)			
Tanggal Surat : 31 Maret 2016			
Perihal : Usulan revisi daftar rencana pinjaman LN jangka menengah (blue book) th 2015-2019			
Lampiran :			
Sifat : <input checked="" type="checkbox"/> Kilat <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa			
DITERUSKAN KEPADA :			
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Dit. Renbang. Pendanaan Pembangunan (8.1) <input type="checkbox"/> Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan (8.2) <input checked="" type="checkbox"/> Dit. Pendanaan Luar Negeri Bilateral (8.3) <input type="checkbox"/> Dit. Pendanaan Luar Negeri Multilateral (8.4) <input type="checkbox"/> Dit. Kerjasama Pembangunan Internasional (8.5) <input type="checkbox"/> Sekretariat D. VIII <input type="checkbox"/> PPK Deputy Pendanaan <input type="checkbox"/> PPK Hibah MCC <input type="checkbox"/> Sesmen PPN/Sestama Bappenas <input type="checkbox"/> Inspektur Utama <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan <input type="checkbox"/> Sahli Bid. SDM dan Penanggulangan Kemiskinan <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Pemerataan dan Kewilayahan <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Hubungan Kelembagaan </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> Deputy I Bid. Pemb. Manusia, Masy., dan Kebudayaan <input type="checkbox"/> Deputy II Bid. Polhukhankam <input type="checkbox"/> Deputy III Bid. Kependudukan dan Ketenagakerjaan <input type="checkbox"/> Deputy IV Bid. Ekonomi <input type="checkbox"/> Deputy V Bid. Kemaritiman dan SDA <input type="checkbox"/> Deputy VI Bid. Sarana dan Prasarana <input type="checkbox"/> Deputy VII Bid. Regional <input type="checkbox"/> Deputy IX Bid. Pemantauan, Evaluasi & Pengendalian Pemb. </div> </div>			
PETUNJUK :			
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 25%;"> <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Jadwalkan <input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Temui/Bicarakan dengan saya <input type="checkbox"/> Buatlah Resume </div> <div style="width: 25%;"> <input type="checkbox"/> Buatlah Tanggapan <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili <input type="checkbox"/> Harap Penuhi <input type="checkbox"/> Jawab/Proses <input type="checkbox"/> Koordinasikan </div> <div style="width: 25%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Perbaiki <input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan <input checked="" type="checkbox"/> Sesuai Catatan <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Laporkan </div> <div style="width: 25%;"> <input type="checkbox"/> Teliti dan Pendapat <input type="checkbox"/> Untuk diketahui <input type="checkbox"/> Untuk dipergunakan <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Dampingi Saya </div> </div>			
CATATAN :			
<p>Menneg PPN (11/4/2016) teliti dan tanggap, siapkan jawaban sesuai ketentuan</p> <p>- Dan perhubungan sds <i>catatan</i> lengkap sesuai surat ke Presiden, u/ sama & proses</p> <p style="text-align: right;">WA 12/04/16.</p>			



LEMBAR EDARAN

NO. AGENDA	TANGGAL SURAT	DITERIMA TANGGAL	TINGKAT SURAT
1706/SM/M.PPN/IV/2016	31-03-2016	04-04-2016	BIASA
Asal Surat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Menteri Perhubungan) Nomor : KU.101/1/1 A PHB 2016 Perihal : Usulan Revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (Blue Book) Tahun 2015-2019			RINGKASAN ISI SURAT
DITERUSKAN KEPADA :		ARAHAN	Usulan Revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (Blue Book) Tahun 2015-2019
Sesmen PPN/Sestama Bappenas	1. Edarkan		
Inspektur Utama	2. Mohon dihadiri/diwakili		
	3. Bicarakan dengan saya		
	4. Dibahas bersama		
DEPUTI BIDANG:	5. Teliti dan tanggapi		
1. Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	6. Siapkan draft/bahan		
2. Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan	7. Siapkan jawaban sesuai ketentuan		
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	8. Siapkan laporan/laporkan		
4. Ekonomi	9. Dapat disetujui		
5. Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	10. Ditolak		
6. Sarana dan Prasarana	11. Perbaiki		
7. Pengembangan Regional	12. Untuk diselesaikan		
8. Pendanaan Pembangunan	13. Koordinasikan		
9. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	14. Untuk diketahui		
SAMEN BIDANG & STAF KHUSUS	15. Untuk menjadi perhatian		
1. Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	16. Dijadwalkan		
2. Hubungan Kelembagaan	17. Dampingi		
3. Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	18. Tindak lanjuti		
4. Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	19. File		
5. Pemerataan dan Kewilayahan			
6. Staf Khusus Menteri			
- Loso Judijanto			
- Danang Rizky Ginanjar			
7. Tim Asistensi			
PUSAT:			
1. Pembinaan Pendidikan & Pelatihan Perencanaan			
2. Data & Informasi Perencanaan Pembangunan			
LAINNYA:			
Sekretariat			
Catatan/Arahan:			
			 Sofyan A. Djalil



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Nomor : KU.101/1/1 A PHB 2016
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Usulan Revisi Daftar Rencana
Pinjaman Luar Negeri Jangka
Menengah (*Blue Book*) Tahun
2015 - 2019

Jakarta, 31 Maret 2016

Kepada
Yth Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
di
J A K A R T A

1. Menyusuli surat kami Nomor : KU.105/1/1 A PHB 2016 tanggal 21 januari 2016 perihal seperti tersebut pada pokok surat dan menindaklanjuti surat kami kepada Presiden Nomor : UM.202/2/3 A Phb-2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI ke Jepang tanggal 23 s.d 24 Februari 2016, dengan ini diusulkan penambahan kegiatan Kementerian Perhubungan sebagai revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (*Blue Book*) Tahun 2015 - 2019, yaitu **Pembangunan Pelabuhan Patimban dengan estimasi biaya \pm US \$ 3 milyar.**
2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Tembusan.
Menteri Keuangan.





**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KU.105/1/1 A PHB 2016
Klasifikasi : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Revisi Daftar Rencana
Pinjaman Luar Negeri Jangka
Menengah (*Blue Book*) Tahun
2015 - 2019

Jakarta, 21 Januari 2016

Kepada

Yth. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

di

JAKARTA


1. Menunjuk surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor 0243/M.PPPN/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Penyampaian DRPLN-JM (*Blue Book*) Tahun 2015 - 2019, bersama ini disampaikan usulan penambahan kegiatan Kementerian Perhubungan sebagai revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*) Tahun 2015 - 2019, sebagai berikut :
 - a. *Procurement of 1000 Km Track Material and 300 units Turn Out - Phase IV (UIC-54);*
 - b. *Surabaya Regional Railway Line Phase I;*
 - c. *Construction of Railway Line for Bitung - Gorontalo - Isimu;*
 - d. *Construction of Railway Line for Pare-Pare - Mamuju;*
 - e. *Construction of Railway Line for Mamuju - Palu;*
 - f. *Construction of Railway Line of Palu - Isimu;*
 - g. *Construction of Railway Line for Tanjung - Martapura - Banjarmasin;*
 - h. *Construction of Railway Line for Balikpapan - Samarinda;*
 - i. *Construction of Railway Line for Tanjung - Balikpapan;*
 - j. *Construction of Railway Line for Banjarmasin - Palangkaraya;*
 - k. *Construction of Railway Line for Palangkaraya - Sangau;*
 - l. *Construction of Railway Line for Sangau - Pontianak;*
 - m. *Construction of Railway Line for Sorong - Manokwari;*

- n. *Construction of Railway Line for Sarmi - Jayapura;*
- o. *Development of Railway Quality Assurance Facility;*
- p. *Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation;*
- q. Pembangunan 16 (enam belas) unit Kapal Kelas I Kenavigasian;
- r. Pembangunan 4 (empat) unit Kapal Induk Kenavigasian.

dengan rincian dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana terlampir.

- 2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN



IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth :
Menteri Keuangan



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UM.202/2/3 A Phb-2016
Klasifikasi : Segera
Lampiran :
Perihal : Laporan Kunjungan Kerja Menteri
Perhubungan RI Ke Jepang tanggal
23 s.d 24 Februari 2016

Jakarta, 26 Februari 2016

Kepada


Yth. **Bapak Presiden RI**

di

JAKARTA

1. Dengan hormat dilaporkan bahwa Menteri Perhubungan telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Tokyo pada tanggal 23 s.d 24 Februari 2016. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Kunjungan Kerja sebelumnya tanggal 5 s.d. 6 Desember 2015 dalam rangka meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Jepang di Indonesia. Dalam kunjungan ini, Menteri Perhubungan didampingi oleh Bapak Yusron Ihza Mahendra (Dubes RI di Jepang), Bapak Sofyan Wanandi (Tim Ahli Wakil Presiden RI), dan Bapak Rachmat Gobel (Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ)).
2. Pihak Jepang yang ditemui dalam kunjungan ini terdiri dari Instansi Pemerintah dan perusahaan swasta yang berperan penting dalam pembangunan maupun pembiayaan infrastruktur yaitu :
 - a. Mr. Toshihiro Nikai, Ketua Liga Parlemen Indonesia – Jepang;
 - b. Mr. Hiroto Izumi, Penasehat khusus PM Jepang dalam bidang infrastruktur;
 - c. H.E Mr. Keiichi Ishii, Menteri *Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism* (MLIT);
 - d. H.E Mr. Seiji Kihara, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang (*State Minister for Foreign Affairs*);
 - e. Mr. Hideaki Dohmichi, Senior Vice President JICA;
 - f. Mr. Ishiyama Takao Executive Director, JR East;
 - g. Mr. Tetsuji Nakagawa, Senior Vice President Division COO New Energy & Power Generation Division- Mitsubishi Corporation.
3. Kementerian Perhubungan menyampaikan paparan dan penjelasan mengenai Pembangunan Pelabuhan Patimban, Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera, Trans Sulawesi dan peningkatan (*Improvement*) Jalur Kereta Api Lintas Utara Jawa, sebagai berikut:
 - a. Terkait rencana pembangunan Pelabuhan Patimban (Subang):
 - 1) Pelabuhan ini direncanakan akan beroperasi dengan kapasitas 7.500.000 TEU's per tahun dan \pm 250.000 mobil per tahun dengan total biaya diperkirakan sebesar \pm 3 Milyar US Dollar.

/2) Pembangunan.....

- 
- 2) Pembangunan akan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap dan diharapkan pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada pertengahan tahun 2017 sehingga minimum operasional dapat dilaksanakan pada tahun 2019.
 - 3) Pemerintah Indonesia mengusulkan skema pembiayaan pinjaman Pemerintah Jepang dengan STEP Loan.
 - 4) Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan yang kepemilikannya dipunyai Pemerintah Indonesia, sedangkan operasional pelabuhan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan gabungan antara Indonesia dan Jepang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.
 - 5) Pemerintah Indonesia masih menunggu jawaban resmi dari Pemerintah Jepang terkait Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada *Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism* (MLIT) melalui Kedutaan Jepang di Indonesia perihal pembangunan Pelabuhan Patimban, setelah kesepakatan tercapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang maka Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi untuk mengusulkan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Pelabuhan Patimban.
- b. Disampaikan juga bahwa pembangunan Trans Sumatera dengan panjang *track* 1.590 Km, dan Trans Sulawesi dengan panjang *track* 1.507 Km yang saat ini sedang dilakukan pembangunan dengan anggaran pemerintah namun masih diperlukan pembiayaan lanjutan. Total estimasi biaya yang dibutuhkan sebesar \pm 6 Milyar US Dollar sehingga diusulkan skema pembiayaan berupa STEP Loan, dimana untuk teknologi pembangunan infrastruktur dapat dilakukan oleh Pihak Jepang.
 - c. Dalam Peningkatan pembangunan Kereta Api Lintas Utara Jawa, telah dibangun jalur ganda (*double track*) dan jarak tempuh dari Jakarta ke Surabaya dengan jalur ganda ini sejauh 727 km, saat ini direncanakan untuk peningkatan kecepatan kereta yang sekarang max kecepatan 100 km/jam menjadi max kecepatan 150 km/jam sehingga waktu tempuh menjadi 6 jam. Diperlukan peningkatan dalam sistem pensinyalan, konstruksi bawah jalan rel dan juga sarana kereta api yang sesuai dengan kecepatan yang direncanakan dengan total estimasi biaya sebesar \pm 2 Milyar US Dollar. Diharapkan Pemerintah Jepang dapat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan dan pemerintah Indonesia mengusulkan untuk pembiayaan dengan STEP Loan.
4. Terhadap pemaparan Menteri Perhubungan, Pihak Jepang menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Pihak Jepang umumnya mendukung dan menyambut secara positif rencana program Pemerintah Indonesia untuk membangun Pelabuhan Patimban, Trans Sumatera, Trans Sulawesi dan Kereta Api Jalur Lintas Utara dan akan dilakukan kajian lebih mendalam.
 - b. Menteri MLIT mengharapkan proyek-proyek tersebut tercantum dalam *blue book* atau Rencana Strategis Nasional Indonesia dan selanjutnya perlu dibuat *working group* di bidang teknis kepelabuhanan maupun bidang teknis perkeretaapian.
 - c. Pemerintah Jepang juga meminta adanya keputusan formal seperti Keputusan Presiden yang mendukung rencana tersebut.

5. Dalam kesempatan terpisah juga dilakukan pertemuan, antara Ditjen Perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Operator Kereta Api Besar di Jepang (JR East), dengan materi bahasan sebagai berikut :
- Direncanakan menambah jumlah pengiriman gerbong ke Indonesia Type JR 205 menjadi 120 unit per tahun agar dapat mencapai target KCJ 1000 unit.
 - Kerjasama dalam pengadaan 2 (dua) unit simulator yang bersifat *mobile* dengan tujuan simulator tersebut dapat dipindahkan menurut kebutuhan sesuai lokasi/tempat pengguna simulator tersebut.
 - Kerjasama pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pegawai PT. KAI.
 - Kerjasama ATS (*Automatic Train Stopper*) / ATP (*Automatic Train Protection*) sebagai alat mencegah kecelakaan kereta api dengan pihak Jepang yang diharapkan dapat digunakan di seluruh Jabodetabek selaras dengan standar dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
 - Perawatan terhadap *ballast* bantalan rel jalur layang kereta api yang sudah rusak tanpa mengganggu operasional lalu lintas kereta api.
6. Pada kesempatan ini selain melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Jepang, karni juga meluangkan waktu berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang berada di wilayah Tokyo seputar transportasi di Indonesia dan permasalahan penjagaan laut dan pantai. Pada umumnya pelajar/mahasiswa Indonesia di Jepang sangat memahami kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini dan mendukung penuh atas kebijakan tersebut.
7. Demikian dilaporkan, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut, atas perhatian Presiden kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth.:

1. Wakil Presiden RI;
2. Sekretaris Kabinet RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI;
7. Menteri Luar Negeri RI;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.